



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Rencana Kerja

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Tahun 2025



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR **23** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 23

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun lalu dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.....	17
2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	18
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)	18
2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	18
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 25

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN-RB) Republik Indonesia 25

3.1.2. Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia 25

3.1.3. Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia 25

3.1.4. Komisi Aparatur Sipil Negara 25

3.1.5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28

3.3. Program dan Kegiatan..... 28

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 35

BAB V : PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Riau 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 15

Tabel 2.3 Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2023 17

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Riau 20

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan BKD Provinsi Riau Tahun 2025 24

Tabel 3.1 Keselarasan Program Nasional dan Program Prioritas dengan Program Daerah 26

Tabel 3.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 28

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Riau 31

Tabel 4.1 Rumusan Rencana dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja SKPD 2

Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen RKD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

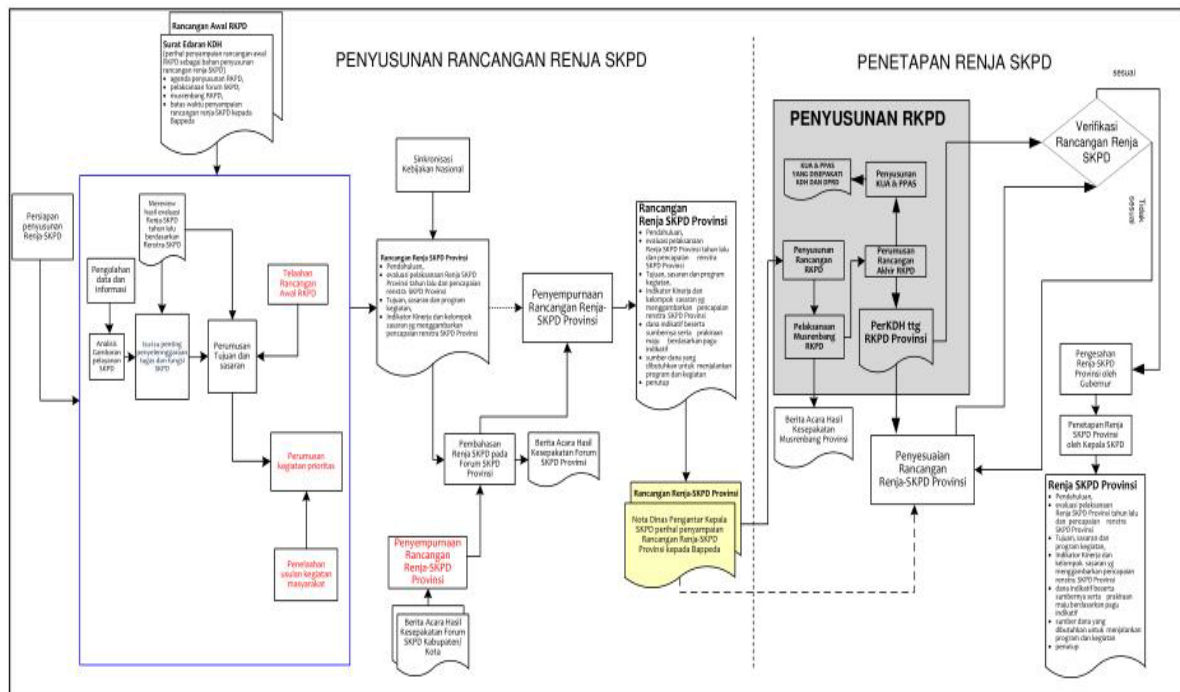
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki, penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

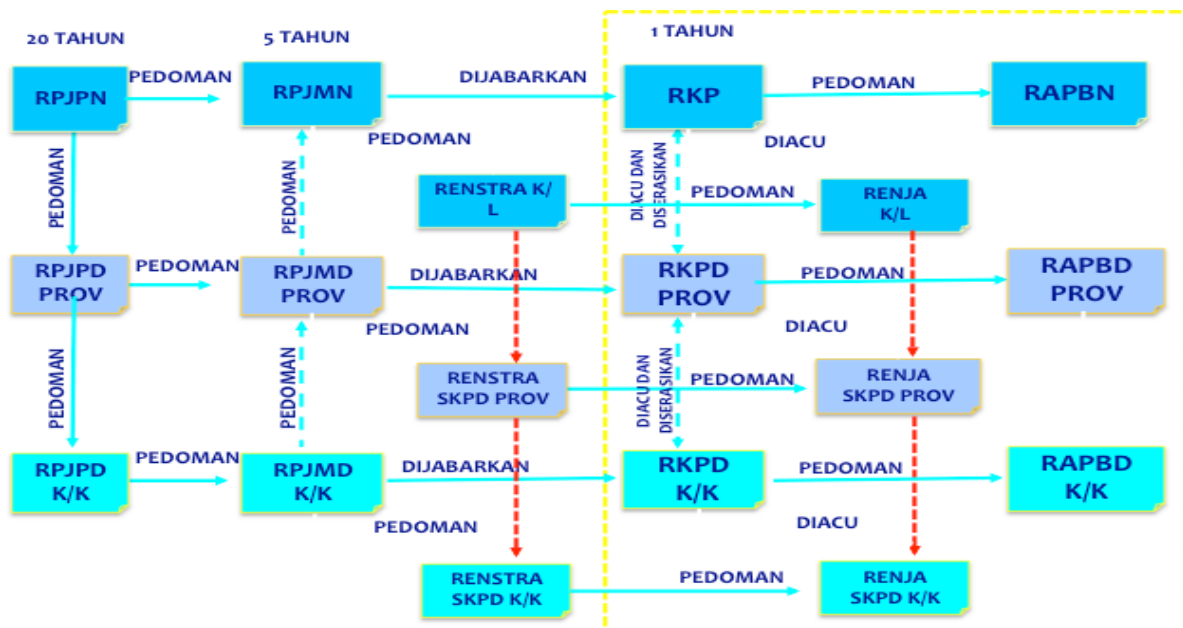
Sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
- 4) Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
- 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tahapan Penyusunan Renja SKPD



keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja



Tahun 2025 merupakan tahun transisi pasca diterbitkannya Perubahan Undang-Undang Pemilu yang mengamanatkan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan Periode RPJMD yang berakhir pada tahun 2024. Berdasarkan instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024. Dokumen RPD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024.

Renstra Perangkat Daerah kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat lebih teknis dan operasional. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau untuk verifikasi agar selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Setelah diverifikasi, Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Riau Tahun 2025.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau harus memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada realisasi APBD Tahun 2023 dan Tahun 2024, serta sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau agar tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 12) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025;
- 13) Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 18);

- 24) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
- 26) Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- 27) Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
- 28) Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2024-2029;
- 29) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 adalah :

- 1) Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
- 2) Sebagai instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja instansi pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan subbab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subbab sebagai berikut.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau

Bagian ini membahas evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 berdasarkan APBD. Hasil evaluasi ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKD Provinsi Riau berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2025-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya berakhir pada tahun 2024. Dalam penyusunan Renja, BKD Provinsi Riau harus memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023 dan 2024, serta sasaran dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini penting untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja BKD Provinsi Riau Tahun 2023 disusun berdasarkan laporan kinerja tahunan yang memuat capaian target tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, serta realisasi anggaran. Sedangkan evaluasi tahun berjalan disusun berdasarkan realisasi capaian renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Evaluasi ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja BKD Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan (2024) disajikan dalam format T-C.29 pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i> / Kegiatan <i>(Output)</i>	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
TAHUN 2022												
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum										
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum										
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	21	Jenis	21	Jenis					21	100%
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Unit	6	Unit					6	100%
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	69	Jenis	69	Jenis					69	100%
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9300	Porsi	9205	Porsi					9205	99%
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	39	Jenis	40	Jenis					40	103%
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65	Kali	75	Kali					75	115%
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	16	Surat	16	Surat					16	100%
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3	Rekening	3	Rekening					3	100%
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	492	Bulan	456	OB					456	93%
		Jumlah tenaga satpam yang disediakan	240	OB	240	OB					240	100%
		Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	OB	12	Bulan					12	100%
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara										
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14	Unit	14	Unit					14	100%
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	145	Unit	145	Unit					145	100%
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2	Ruangan	2	Ruang					2	100%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan										
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen						1	100%
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang direkrut	350	Orang	350	Orang						350	100%
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang difasilitasi	600	Berkas	600	Berkas						600	100%
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	3	Agenda	3	Agenda						3	100%
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	1	Modul	1	Modul						1	100%
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2500	Data elektronik	2500	Data elektronik						2500	100%
			350	Orang	350	Orang						350	100%
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	1	Modul	1	Modul						1	100%
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN											
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	1	Dokumen	1	Dokumen						1	100%
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas ASN yang dikelola	4000	Berkas	4000	Berkas						4000	100%
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen penataan	1	Dokumen	1	Dokumen						1	100%
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN											
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pemetaan, evaluasi dan talent pool	2	Dokumen	1	Dokumen						1	50%
		Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	1	Dokumen	1	Dokumen						1	100%
		Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1	Dokumen	1	Dokumen						1	100%
		Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan	1	Modul	1	Modul						1	100%
		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor	20	Orang	20	Orang						20	100%
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	18	Orang	18	Orang						18	100%
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja	2	Orang	2	Orang						2	100%
		Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	126	Orang	122	Orang						122	97%
		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	45	orang	45	Orang						45	100%
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1	Orang	1	Orang						1	100%
		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	6	Orang	5	Orang						5	83%
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat fungsional	40	Orang	40	Orang						40	100%
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT	2	Dokumen	2	Dokumen						2	100%
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen						2	100%
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22	Orang	20	Orang						20	91%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)		
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1000	Orang	1000	Orang						1000	100%		
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikonseling	28	Orang	28	Orang						28	100%		
		Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12	Kali	12	Kali						12	100%		
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani ASN	70	Kasus	63	Kasus						63	90%		
TAHUN 2023															
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum													
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum													
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	Paket			1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	100%
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Paket			3	Paket	3	Paket	100%	2	Paket	5	83%
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket			1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	100%
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket			1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	100%
5.03.01.1.06.057	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket			1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	2	100%
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan			1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	100%
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan			1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	100%
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	24	100%
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	24	100%
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara													
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit			1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	100%
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14	Unit			13	Unit	13	Unit	100%	14	Unit	14	100%
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	290	Unit			141	Unit	141	Unit	100%	229	Unit	370	128%
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2	Unit			1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	100%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan												
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga		1	Lembaga	1	Lembaga	100%	1	Lembaga	2	100%
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Laporan		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Laporan	2	100%
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN												
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Laporan		2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	4	100%
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN												
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	12	Orang		4	Orang	4	Orang	100%	6	Orang	10	83%
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	80	Orang		40	Orang	40	Orang	100%	40	Orang	80	100%
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	100%
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	40	Orang		20	Orang	20	Orang	100%	20	Orang	40	100%
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	2000	Orang		1.000	Orang	1.283	Orang	128%	1000	Orang	2283	114%
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160	Orang		80	Orang	80	Orang	100%	80	Orang	160	100%
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	100%

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau pada Tahun 2023 telah terlaksana sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan serta berhasil mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor penting, yaitu:

- a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan
BKD Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara konsisten, sesuai dengan jadwal dan target yang ditetapkan. Konsistensi ini memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan
BKD Provinsi Riau mampu menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Koordinasi yang baik antar stakeholder baik internal maupun eksternal BKD
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja juga didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, baik di dalam internal BKD maupun dengan pihak eksternal yang terkait. Koordinasi ini memungkinkan adanya sinergi dan kerjasama yang efektif dalam mencapai tujuan bersama.

Faktor-faktor tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan BKD Provinsi Riau dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2023 dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD Provinsi Riau.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur dengan sasaran Meningkatnya implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Adapun indikator kinerja

utama sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah Indeks Sistem Merit.

Capaian kinerja pelayanan BKD Provinsi Riau melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di dalam Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disajikan dalam format T-C.30 pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKD Provinsi Riau							Realisasi Capaian							Rasio Capaian Tahunan						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13	14	15	15	15	16	17	18	19	20	20	20
1	Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Riau			45	50						50,09	52,40						111%	105%					
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			65 (B)	66 (B)						77,37 (B)	83,93 (B)						119%	127%					
3	Persentase Pemenuhan Implementasi Reformasi Birokrasi Level Mikro			70 %	75 %						99,99%	99,66 %						143%	133%					
4	Indeks Sistem Merit			236,60	246,60	255,91	266,14	276.79	333	343	293,50	297,5	300,5	318,0				124%	121%	117%	119%			
5	Persentase Pemenuhan Implementasi Reformasi Birokrasi Level Mikro								100	100														

Catatan :
Kriteria Nilai Indeks Profesionalitas ASN
91-100 Sangat Tinggi
81-90 Tinggi
71-80 Sedang
61-70 Rendah
≤60 Sangat Rendah

Kriteria Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
88,31-100 Sangat Baik
76,61-88,30 Baik
65,00-76,60 Kurang Baik
25,00-64,99 Tidak Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2024 telah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama ini mengacu pada dokumen perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Dalam memproyeksikan Rencana Kerja BKD Provinsi Riau Tahun 2025 agar tercapainya sasaran pembangunan SDM serta agar seluruh program dan kegiatan dapat dirasakan oleh seluruh ASN Provinsi Riau, maka sangat diperlukan adanya pengarusutamaan gender sebagai salah satu pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran BKD Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang menginstruksikan untuk:

- 1) Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
- 2) Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BKD Provinsi Riau telah mengupayakan optimalisasi penyusunan anggaran dengan perspektif gender yang antara lain dilakukan dalam bentuk:

- 1) Menetapkan Surat Keputusan tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender
- 2) Menyusun Gender Analysis Pathway, yaitu pendekatan atau alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hal ini terkait dengan akses dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian
- 3) Menyusun analisis anggaran dalam bentuk Gender Budget Statement, yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang anggaran suatu instansi atau lembaga yang telah dirancang dengan mempertimbangkan perspektif gender. GBS menunjukkan komitmen dan upaya instansi dalam mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kesenjangan gender dan mempromosikan kesetaraan gender.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah upaya pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, yaitu Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung Reformasi Birokrasi. Sistem Merit merupakan landasan dalam pengelolaan ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Implementasi Sistem Merit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan integritas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Sistem Merit memiliki kaitan erat dengan Reformasi Birokrasi, karena keduanya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang prima. Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN merupakan salah satu langkah penting dalam Reformasi Birokrasi, karena dengan menerapkan prinsip-prinsip merit dalam rekrutmen, seleksi, pengembangan karier, dan manajemen kinerja ASN, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, dan berintegritas.

BKD Provinsi Riau sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian daerah, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Sistem Merit dan mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh BKD Provinsi Riau antara lain: (1) Melakukan penataan dan penguatan kelembagaan BKD agar dapat menjalankan fungsi manajemen ASN berbasis merit secara optimal; (2) Menyusun kebijakan, pedoman, dan instrumen teknis dalam implementasi Sistem Merit, seperti dalam hal pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan promosi jabatan; (3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai BKD dalam pengelolaan manajemen ASN berbasis merit; dan (4) Membangun dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mendukung pengambilan keputusan serta pelayanan kepegawaian dalam manajemen ASN.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu indeks sistem merit. Upaya pencapaian indikator kinerja dimaksud didukung oleh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Adapun hasil penilaian indeks sistem merit Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019 s.d 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Aspek	Bobot	Skor Maks.	2019		2020		2022		2023	
			Skor	%	Skor	%	Skor	%	Skor	%
Perencanaan Kebutuhan	10	40	25	62.5	40	100	37.5	93.8	40	100
Pengadaan	10	40	24	60	34	85	36	90	38	95
Pengembangan Karir	30	120	45	37.5	70	58.3	75	62.5	85	70.8
Promosi dan Mutasi	10	40	15	37.5	15	37.5	17.5	43.8	20	50
Manajemen Kinerja	20	80	60	75	70	87.5	62.5	78.1	60	75
Penggajian, Penghargaan, Disiplin	10	40	32.5	81.3	32.5	81.3	40	100	40	100
Perlindungan dan Pelayanan	4	16	8	50	14	87.5	14	87.5	16	100
Sistem Informasi	6	24	18	75	18	75	18	75	19	79.2
Total	100	400	227.5	Krg	293.5	Baik	300.5	Baik	318.0	Baik

Sumber, KASN (2023), diolah

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, hasil penilaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, skor Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada kategori "Kurang" dengan nilai 227,5. Namun, pada tahun 2023, skornya meningkat menjadi 318 dan masuk kategori "Baik".

Aspek promosi dan mutasi merupakan aspek dengan nilai terendah secara konsisten sejak tahun 2019. Berdasarkan catatan dari KASN sebagaimana tercantum dalam Keputusan KASN Nomor 89/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, penyebab rendahnya kinerja aspek promosi dan mutasi dalam Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Riau adalah kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang masih belum menerapkan mekanisme manajemen talenta.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Penerapan sistem merit dalam birokrasi, khususnya dalam promosi dan mutasi, merupakan pilar utama untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berkinerja tinggi, dan berintegritas. Namun, hasil penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan bahwa implementasi sistem merit di Pemerintah Provinsi Riau masih jauh dari harapan, terutama dalam aspek promosi dan mutasi. Data menunjukkan adanya permasalahan kebijakan yang krusial dan memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Riau.

Salah satu permasalahan mendasar adalah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang belum menerapkan mekanisme manajemen talenta sebagaimana diamanatkan dalam penilaian indeks sistem merit. Hal ini tercermin dari rendahnya kinerja aspek promosi dan mutasi dalam implementasi sistem merit Pemerintah Provinsi Riau selama periode 2019-2023 dibandingkan dengan aspek lainnya. Ketidaksesuaian ini menghambat upaya untuk menghasilkan pejabat yang kompeten dan berintegritas dalam menduduki posisi strategis di birokrasi.

Selain itu, penerapan sistem informasi dalam pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga belum optimal. Diperlukan pengembangan modul layanan terbaru yang sejalan dengan kebijakan di tingkat pusat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepegawaian. Pengembangan sistem informasi yang komprehensif akan memudahkan pengelolaan data kepegawaian, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam manajemen aparatur sipil negara.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemanfaatan hasil penilaian kinerja dalam pemberian reward dan punishment. Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau baru sebatas pemberian penghargaan terhadap prestasi serapan realisasi anggaran tahunan, yang belum mencerminkan substansi dari penilaian kinerja. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengaitkan hasil penilaian kinerja dengan pemberian insentif, promosi, atau sanksi yang sesuai. Hal ini akan mendorong aparatur sipil negara untuk meningkatkan produktivitas, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau perlu segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki implementasi sistem merit secara menyeluruh. Komitmen dan ketegasan dari pimpinan daerah sangat diperlukan untuk mendorong reformasi birokrasi yang substantif. Hanya dengan penerapan sistem merit yang konsisten dan transparan, Pemerintah Provinsi Riau dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, dan berintegritas demi pelayanan publik yang optimal.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”***. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, resistensi terhadap perubahan dan

budaya kerja yang telah mengakar dalam birokrasi dapat menjadi hambatan dalam penerapan sistem merit secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan yang persuasif dan edukatif untuk mengubah mindset dan perilaku aparatur sipil negara agar lebih terbuka terhadap inovasi dan peningkatan kinerja. Kedua, keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi informasi dapat menjadi kendala dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian yang komprehensif. Diperlukan perencanaan anggaran yang cermat dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Pertama, dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah dan stakeholder terkait dapat menjadi modal utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang substantif. Dengan adanya visi yang sama dan sinergi antara berbagai pihak, implementasi sistem merit dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Kedua, perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan peluang untuk mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan user-friendly. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, pelayanan kepegawaian dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Ketiga, potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat menjadi aset berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang tepat, aparatur sipil negara dapat menjadi agen perubahan yang proaktif dan inovatif dalam memajukan birokrasi di Provinsi Riau.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Beberapa isu-isu penting yang dapat direkomendasikan sebagai catatan strategis sebelum dirumuskannya program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2025 adalah :

- 1) Belum diimplementasikannya kebijakan manajemen talenta dalam pengisian jabatan
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian
- 3) Belum optimalnya penilaian kinerja dan pemanfaatannya dalam pemberian reward dan punishment

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merumuskan program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2025.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan rencana kerja, Perangkat Daerah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan RKPD. Jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti adanya program dan kegiatan baru yang tidak tercantum dalam rancangan awal RKPD atau perbedaan besaran anggaran, maka dilakukan penyesuaian.

Hasil perbandingan Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau menunjukkan bahwa:

- a. Tidak ada usulan kegiatan baru antara Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan.
- b. Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada setiap kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD belum sesuai dengan analisis kebutuhan perangkat daerah.

Review lengkap terhadap Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan BKD Provinsi Riau Tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Riau

No.				Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	22.753.387.689	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	26.014.152.067	
03	1	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen	7 Dokumen	183.183.022	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen	7 Dokumen	183.185.202	
03	1	101	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	183.183.022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	183.185.202	
03	1	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	16.650.877.478	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	19.848.684.507	
03	1	102	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	16.650.877.478	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	19.848.684.507	
03	1	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	4 Laporan	69.498.553	Administrasi Barang Milik Daerah pada		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	4 Laporan	69.499.745	
03	1	103	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	18.999.553	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	22.500.056	
03	1	103	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.499.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	46.999.689	
03	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis	147.095.087	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis	147.101.300	
03	1	105	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	98.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	98.000.000	
03	1	105	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	49.095.087	Pendataan dan Pengolahan Administrasi		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	49.101.300	
03	1	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	7 Jenis Layanan	1.766.121.422	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	7 Jenis Layanan	1.846.235.217	
03	1	106	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.944.580	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.944.580	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.060.000	
03	1	106	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	479.995.426	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	479.999.862	

No.					Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	1	106	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	160.167.316	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	160.208.415		
03	1	106	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.659.532	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32.661.360		
03	1	106	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	899.899.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	899.899.000		
03	1	106		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	114.455.568	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	114.462.000		
03	1	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Jenis	499.996.352	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Jenis	484.240.320		
03	1	107		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	178.364.352	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	180.240.320		
03	1	107		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	321.632.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	304.000.000		
03	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	2.655.505.775	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2 Jenis	2.653.905.776		
03	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	739.914.159	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	739.914.160		
03	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.915.591.616	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.913.991.616		
03	1	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 Jenis	781.110.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 Jenis	781.300.000		
03	1	109	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.730.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.730.000		
03	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	342.940.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	342.940.000		
03	1	109		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	30.000.000		
03	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212 Unit	186.330.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	186.520.000		

No.				Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03	1	109	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.110.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.110.000	
03	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	11.444.917.758	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	10.541.616.324	
03	2	101		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Fasilitas Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan	100 Persen	2.504.255.010	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Fasilitas Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan	100 Persen	2.389.481.601	
03	2	101	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	34.876.801	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	34.878.586	
03	2	101	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	728.738.829	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	728.740.026	
03	2	101	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	495.129.345	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	495.137.829	
03	2	101	8	Fasilitas Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	685.510.577	Fasilitas Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	685.514.946	
03	2	101	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	344.999.786	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	295.140.215	
03	2	101	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	214.999.672	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	150.069.999	
03	2	102		Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi Kepangkatan dan Promosi ASN	100 Persen	1.214.711.663	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi Kepangkatan dan Promosi ASN	100 Persen	1.214.715.019	
03	2	102	1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	355.768.062	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	355.770.610	
03	2	102	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	466.511.579	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	466.511.579	
03	2	102	3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	392.432.022	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	392.432.830	
03	2	103		Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	6.213.923.138	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	5.678.470.752	
03	2	103	2	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	828.676.650	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	828.677.288	

No.				Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			12
03	2	103	3	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	70.888.005	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	104.995.100	
03	2	103	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	2.394.186.930	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	2.049.999.822	
03	2	103	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	865.462.244	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	640.080.000	
03	2	103	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7 Orang	894.992.840	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7 Orang	894.992.840	
03	2	103	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	55 Orang	770.133.358	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	55 Orang	770.133.933	
03	2	103		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	50 Orang	144.312.347	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	50 Orang	144.315.891	
03	2	103	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	245.270.764	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	245.275.878	
03	2	104		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselesaikan	100 Persen	1.512.027.947	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselesaikan	100 Persen	1.258.948.952	
03	2	104	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	99.980.256	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	99.984.465	
03	2	104	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	857.434.406	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	600.000.050	
03	2	104	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1.000 Orang	95.735.865	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1.000 Orang	100.085.792	
03	2	104	7	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	223.980.690	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	223.981.047	
03	2	104	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	199.999.544	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	199.999.894	
03	2	104		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	34.897.186	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	34.897.704	
JUMLAH								34.198.305.447	JUMLAH					36.555.768.391

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, wajib memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat, terutama dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan urusan kepegawaian dan manajemen ASN secara umum.

3.1.1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Kementerian PAN-RB berperan dalam menetapkan kebijakan nasional terkait manajemen aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Kebijakan ini menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam mengelola kepegawaian daerah, seperti penerapan sistem merit, peningkatan profesionalisme, dan penegakan disiplin aparatur.

3.1.2 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertanggung jawab dalam mengelola sistem informasi kepegawaian nasional. BKN menyediakan pedoman dan standar yang harus diikuti oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan seleksi dan promosi, serta pengembangan kompetensi aparatur.

3.1.3 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara (LAN) berperan dalam mengembangkan standar kompetensi dan kurikulum pelatihan bagi aparatur sipil negara. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu mengacu pada standar dan kurikulum yang ditetapkan oleh LAN dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

3.1.4 Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertugas mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau harus memperhatikan rekomendasi dari KASN dalam menegakkan integritas dan profesionalisme aparatur, serta mencegah praktik penyimpangan dalam manajemen kepegawaian daerah.

3.1.5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh KPK baik Stranas-PK maupun MCP Korsupgah KPK dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian daerah untuk mencegah praktik korupsi.

Tabel 3.1
Keselarasan Program Nasional dan Program Prioritas dengan Program Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PRIOTAS NASIONAL	RAKORTEKBANG	PAGU			
							KEMISKINAN DAN KEMISKINAN NASIONAL	STUNTING	RAD DISAILITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-	-	Rp. 180.110.000	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen					Rp. 34.876.801	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen					Rp. 728.738.829	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen			-	-	-	Rp. 828.676.650
			Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen			-	-	-	Rp. 70.888.005
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen			-	-	-	Rp. 2.394.186.93
			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen			-	-	-	Rp. 865.462.244
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	7 Orang			-	-	-	Rp. 894.992.840

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PRIOTAS NASIONAL	RAKORTEKBANG	PAGU			
							KEMISKINAN DAN KEMISKINAN NASIONAL	STUNTING	RAD DISAILITAS	PENINGKATAN KAPASITAS
							-	-	-	Rp. 770.133.358
										Rp. 144.312.347
							-	-	-	Rp. 245.270.764

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Penataan SDM Aparatur		Persentase Pemenuhan Implementasi Reformasi Birokrasi Level Mikro	100	100
		Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	333	343

Sumber: Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2025-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Isu Strategis Nasional seperti implementasi Reformasi Birokrasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN, peningkatan pelayanan publik, dan sebagainya
- b. Program strategis Kementerian/Lembaga terkait SDM aparatur
- c. Tema dan fokus prioritas dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD 2025
- d. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah;
- e. Realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan
- f. Target Renstra BKD Provinsi Riau sampai Tahun 2025

Adapun uraian mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan/Material
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
 - 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 6) Pengelolaan Data Kepegawaian
- b. Mutasi dan Promosi ASN**
 - 1) Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3) Pengelolaan Promosi ASN
- c. Pengembangan Kompetensi ASN**
 - 1) Pengelolaan Assessment Center
 - 2) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 4) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
 - 5) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - 6) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
 - 7) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - 8) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
 - 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - 3) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

- 4) Pembinaan Disiplin ASN
- 5) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 6) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Rencana program dan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas sudah sesuai dengan nominatif program dan kegiatan beserta anggaran dan target kinerja sebagaimana terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2025. Hal ini sudah sesuai dengan analisis kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan. Apabila terjadi perubahan yang signifikan pada Rancangan Awal RKPD maka akan berdampak pada tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan BKD Provinsi Riau.

Selanjutnya, rumusan rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Riau Tahun 2025 beserta indikator, target, pagu, serta perkiran maju Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum		100 Persen	22.753.387.689				26.928.610.922
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		7 Dokumen	183.183.022			7 Dokumen	218.325.562
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	183.183.022			7 Dokumen	218.325.562
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		1 Laporan	16.650.877.478			1 Laporan	20.375.185.360
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		115 Orang/ Bulan	16.650.877.478			115 Orang/ Bulan	20.375.185.360
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola		4 Laporan	69.498.553			4 Laporan	75.600.000
5.03.01.1.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		3 Dokumen	18.999.553			3 Dokumen	24.840.000
5.03.01.1.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	50.499.000			1 Laporan	50.760.000
5.03.01.1.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi		2 Jenis	147.095.087			2 Jenis	171.000.000
5.03.01.1.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	98.000.000			1 Paket	96.000.000
5.03.01.1.06	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	49.095.087			1 Dokumen	75.000.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		7 Jenis Layanan	1.766.121.422			7 Jenis Layanan	1.587.650.000
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	78.944.580			1 Paket	102.650.000
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	479.995.426			6 Paket	500.000.000
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	160.167.316			1 Paket	175.000.000
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	32.659.532			1 Paket	35.000.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	899.899.000			1 Laporan	650.000.000
5.03.01.1.06.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	114.455.568			1 Dokumen	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		2 Jenis	499.996.352			2 Jenis	410.475.000,00
5.03.01.1.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Paket	178.364.352			2 Paket	180.000.000
5.03.01.1.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		37 Unit	321.632.000			37 Unit	230.475.000
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		2 Jenis	2.655.505.775			2 Jenis	3.378.205.000
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	739.914.159			12 Laporan	824.000.000
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.915.591.616			12 Laporan	2.554.205.000
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		5 Jenis	781.110.000			5 Jenis	712.170.000
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	41.730.000			1 Unit	41.730.000
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	342.940.000			14 Unit	342.940.000
5.03.01.1.09.0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		60 Unit	30.000.000			60 Unit	30.000.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		212 Unit	186.330.000			145 Unit	200.000.000
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	180.110.000			1 Unit	97.500.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan		100 Persen	11.444.917.758				8.936.000.000
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan		100 Persen	2.504.255.010			100 Persen	1.981.000.000
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen	34.876.801			1 Dokumen	40.000.000
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	728.738.829			1 Dokumen	611.000.000
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		2 Dokumen	495.129.345			2 Dokumen	330.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 Lembaga	685.510.577			1 Lembaga	600.000.000
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	344.999.786			4 Dokumen	275.000.000
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 Dokumen	214.999.672			4 Dokumen	125.000.000
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN		100 Persen	1.214.711.663			100 Persen	1.116.000.000
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		1 Dokumen	355.768.062			1 Dokumen	311.000.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 Laporan	466.511.579			1 Laporan	410.000.000
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1 Dokumen	392.432.022			1 Dokumen	395.000.000
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN		100 Persen	6.213.923.138			100 Persen	4.587.500.000
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>		1 Dokumen	828.676.650			1 Dokumen	600.000.000
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		1 Dokumen	70.888.005			1 Dokumen	90.000.000
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		1 Dokumen	2.394.186.930			1 Dokumen	1.800.000.000
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		1 Dokumen	865.462.244			1 Dokumen	500.000.000
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN		7 Orang	894.992.840			7 Orang	550.000.000
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		55 Orang	770.133.358			55 Orang	665.000.000
5.03.02.1.03.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina		50 Orang	144.312.347			50 Orang	142.500.000
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1 Dokumen	245.270.764			1 Dokumen	240.000.000
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselesaikan		100 Persen	1.512.027.947			100 Persen	1.251.500.000
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	99.980.256			1 Dokumen	89.000.000
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		20 Orang	857.434.406			20 Orang	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		1000 Orang	95.735.865			1.000 Orang	100.000.000
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		80 Orang	223.980.690			80 Orang	250.000.000
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1 Laporan	199.999.544			1 Laporan	150.000.000
5.03.02.1.04.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		30 Dokumen	34.897.186			30 Dokumen	112.500.000
JUMLAH					34.198.305.447				35.864.610.922

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat teknis operasional, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan daerah Provinsi Riau yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan memperhatikan prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan yang terdiri atas program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 dirumuskan kembali dalam format TC. 33 tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						34.198.305.447,00							35.864.610.922,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						34.198.305.447,00							35.864.610.922,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						34.198.305.447,00							35.864.610.922,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepegawaian	100 Persen			100 Persen	22.753.387.689,00						100 Persen	26.928.610.922,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	15 Dokumen			7 Dokumen	183.183.022,00			-	Peningkata n Tata Kelola	BKD Provinsi Riau	8 Dokumen	218.325.562,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			7 Dokumen	183.183.022,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	BKD Provinsi Riau	8 Dokumen	218.325.562,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	2 Laporan			1 Laporan	16.650.877.478,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Laporan	20.375.185.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan			115 Orang/ Bulan	16.650.877.478,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	118 Orang/ Bulan	20.375.185.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	4 Laporan			4 Laporan	69.498.553,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Laporan	75.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			3 Dokumen	18.999.553,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	24.840.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	50.499.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Laporan	50.760.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	4 Jenis			2 Jenis	147.095.087,00			-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Jenis	171.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	98.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	96.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			1 Dokumen	49.095.087,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	14 Jenis			7 Jenis	1.766.121.422,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	7 Jenis	1.587.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	78.944.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	102.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket			6 Paket	479.995.426,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	4 Paket	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	160.167.316,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	32.659.532,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Paket	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			1 Laporan	899.899.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Laporan	650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	114.455.568,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	4 Jenis			2 Jenis	499.996.352,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Jenis	410.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Paket			2 Paket	178.364.352,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	3 Paket	180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit			37 Unit	321.632.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	3 Unit	230.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	4 Jenis			2 Jenis	2.655.505.775,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	2 Jenis	3.378.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	739.914.159,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	12 Laporan	824.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	1.915.591.616,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	12 Laporan	2.554.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	10 Jenis			5 Jenis	781.110.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	5 Jenis	712.170.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit			1 Unit	41.730.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Unit	41.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	28 Unit			14 Unit	342.940.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	14 Unit	342.940.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	198 Unit			60 Unit	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	100 Unit	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	291 Unit			212 Unit	186.330.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	150 Unit	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	180.110.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola	ASN BKD Provinsi Riau	1 Unit	97.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen			100 Persen	11.444.917.758,00						100 Persen	8.936.000.000,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 Persen			100 Persen	2.504.255.010,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	100 Persen	1.981.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen			1 Dokumen	34.876.801,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Peningkata n Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen			1 Dokumen	728.738.829,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Dokumen	611.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen			2 Dokumen	495.129.345,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	2 Dokumen	330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga			1 Lembaga	685.510.577,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Lembaga	600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	9 Dokumen			4 Dokumen	344.999.786,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	5 Dokumen	275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	9 Dokumen			4 Dokumen	214.999.672,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	5 Dokumen	125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN</i>	100 Persen			100 Persen	1.214.711.663,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	100 Persen	1.116.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	355.768.062,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	1 Dokumen	311.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan			1 Laporan	466.511.579,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	1 Laporan	410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			1 Dokumen	392.432.022,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau dan Kab/Kota	1 Dokumen	395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN</i>	100 Persen			100 Persen	6.213.923.138,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	100 Persen	4.587.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	828.676.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	70.888.005,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	2.394.186.930,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	865.462.244,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN</i>	14 Orang			7 Orang	894.992.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	7 Orang	550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	110 Orang			55 Orang	770.133.358,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	55 Orang	665.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	150 Orang			50 Orang	144.312.347,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	100 Orang	142.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2 Dokumen			1 Dokumen	245.270.764,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau I	1 Dokumen	240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	100 Persen			100 Persen	1.512.027.947,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	100 Persen	1.251.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen			1 Dokumen	99.980.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Dokumen	89.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	40 Orang			20 Orang	857.434.406,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	20 Orang	550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	2000 Orang			1000 Orang	95.735.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1000 Orang	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160 Orang			80 Orang	223.980.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	80 Orang	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan			1 Laporan	199.999.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	60 Dokumen			30 Dokumen	34.897.186,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Pemprov Riau	30 Dokumen	112.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	J U M L A H							34.198.305.447,00							35.864.610.922,00		

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 ini disusun dengan berkoordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Dengan disusunnya dokumen renja ini diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2025 dapat berjalan secara lebih terarah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau serta tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2025 – 2026.

Demikianlah Renja Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau Tahun 2025 disusun sebagai acuan dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2025.

Pekanbaru,

2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



Dr. Ir. MAMUN MUROD, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SIPD-RI (RENJA 2025)				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03	KEPEGAWAIAN			36.555.768.391,00	5.03	KEPEGAWAIAN			34.198.305.447,00
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100	26.221.588.391,00	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100	22.753.387.689,00
	5.03.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	183.183.884	5.03.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	183.183.022
	5.03.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	183.183.884,00	5.03.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	183.183.022
	5.03.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1	19.848.684.507	5.03.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1	16.650.877.478
	5.03.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	19.848.684.507,00	5.03.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	16.650.877.478
	5.03.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	4	70.000.000	5.03.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	4	69.498.553
	5.03.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	23.000.000,00	5.03.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	18.999.553
	5.03.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	47.000.000,00	5.03.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	50.499.000
	5.03.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2	171.000.000	5.03.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2	147.095.087
	5.03.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	96.000.000,00	5.03.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	98.000.000
	5.03.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	75.000.000	5.03.01.105.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	49.095.087
	5.03.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	7	1.565.050.000	5.03.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	7	1.766.121.422
	5.03.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	89.550.000	5.03.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	78.944.580

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SIPD-RI (RENJA 2025)				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	90.500.000	5.03.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
	5.03.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	480.000.000,00	5.03.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	479.995.426
	5.03.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	145.000.000,00	5.03.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	160.167.316
	5.03.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	35.000.000,00	5.03.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	32.659.532
	5.03.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	600.000.000,00	5.03.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	899.899.000
	5.03.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	125.000.000,00	5.03.01.106.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	114.455.568
	5.03.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2	480.000.000	5.03.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2	499.996.352
	5.03.01.107.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	180.000.000,00	5.03.01.107.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	178.364.352
	5.03.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	300.000.000,00	5.03.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37	321.632.000
	5.03.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2	3.191.500.000,00	5.03.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	2	2.655.505.775
	5.03.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	795.000.000	5.03.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	739.914.159
	5.03.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.396.500.000	5.03.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.915.591.616
	5.03.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5	712.170.000	5.03.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5	781.110.000
	5.03.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	41.730.000	5.03.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	41.730.000

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SIPD-RI (RENJA 2025)				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	342.940.000	5.03.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	342.940.000
	5.03.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	98	30.000.000	5.03.01.109.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60	30.000.000
	5.03.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141	200.000.000	5.03.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212	186.330.000
	5.03.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	97.500.000	5.03.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	180.110.000
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100	10.334.180.000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100	11.444.917.758
	5.03.02.101	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	2.220.000.000	5.03.02.101	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	2.504.255.010
	5.03.02.101.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	1	40.000.000	5.03.02.101.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	1	34.876.801
	5.03.02.101.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	640.000.000	5.03.02.101.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	728.738.829
	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	495.000.000	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	495.129.345
	5.03.02.101.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	600.000.000	5.03.02.101.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	685.510.577
	5.03.02.101.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	295.000.000	5.03.02.101.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	344.999.786
	5.03.02.101.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4	150.000.000	5.03.02.101.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4	214.999.672
	5.03.02.102	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	100	1.214.180.000	5.03.02.102	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	100	1.214.711.663
	5.03.02.102.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan	1	355.514.763	5.03.02.102.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan	1	355.768.062

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SIPD-RI (RENJA 2025)				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.02.102.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	466.512.407	5.03.02.102.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	466.511.579
	5.03.02.102.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	392.152.830	5.03.02.102.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	392.432.022
	5.03.02.103	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	100	5.450.000.000	5.03.02.103	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	100	6.213.923.138
	5.03.02.103.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	600.000.000	5.03.02.103.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	828.676.650
	5.03.02.103.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	105.000.000	5.03.02.103.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	70.888.005
	5.03.02.103.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	2.050.000.000	5.03.02.103.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	2.394.186.930
	5.03.02.103.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	640.000.000	5.03.02.103.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	865.462.244
	5.03.02.103.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7	895.000.000	5.03.02.103.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7	894.992.840
	5.03.02.103.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	55	770.000.000	5.03.02.103.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	55	770.133.358
	5.03.02.103.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	50	145.000.000	5.03.02.103.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	50	144.312.347
	5.03.02.103.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	245.000.000	5.03.02.103.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	245.270.764
	5.03.02.104	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	100	1.450.000.000	5.03.02.104	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	100	1.512.027.947
	5.03.02.104.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	100.000.000	5.03.02.104.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	99.980.256
	5.03.02.104.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20	600.000.000	5.03.02.104.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20	857.434.406

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SIPD-RI (RENJA 2025)				
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)				TARGET 2025	RANCANGAN AKHIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.03.02.104.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000	100.000.000	5.03.02.104.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000	95.735.865
	5.03.02.104.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80	300.000.000	5.03.02.104.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80	223.980.690
	5.03.02.104.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	150.000.000	5.03.02.104.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	199.999.544
	5.03.02.104.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30	200.000.000	5.03.02.104.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30	34.897.186



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172 - 848593 – 33073 Fax (0761) (0761) 21172 - 848593 – 33073
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

Nomor: Kpts.000.7.2.4/BKD/1.1/II/2024/2736

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tentang Tim Penyusun Renja Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)

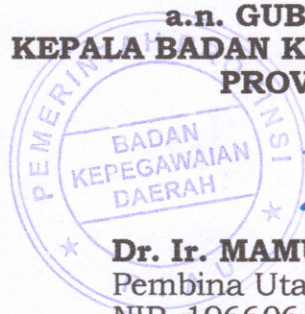
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Perovinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 02 Februari 2024

**a.n. GUBERNUR RIAU,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



Dr. Ir. MAMUN MUROD, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008

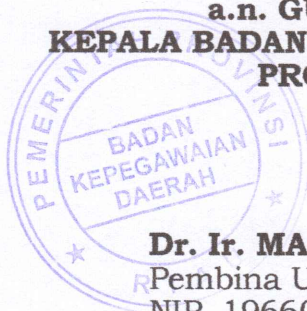
Lampiran I : Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts.000.7.2.4/BKD/1.1/II/2024/2736
Tanggal : 02 Februari 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	T. Faisyal, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Harry Prabowo, S.STP., M.E	Perencana Ahli Muda	Ketua Tim
3	Fanny Ramadhani, S.STP	Pelaksana	Sekretaris
4	Matwimiyadi, SKM. M.Kes	Perencana Ahli Muda	Anggota
5	Nanang Kusnadi, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
6	Ira Diana Sari, SE	Pelaksana	Anggota
7	Satria Nugraha, S.STP, M.Si	Pelaksana	Anggota
8	Prima Putra	Pelaksana	Anggota
9	Rulianto	Norr – ASN	Operator

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 02 Februari 2024

a.n. GUBERNUR RIAU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU



Dr. Ir. MAMUN MUROD, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008

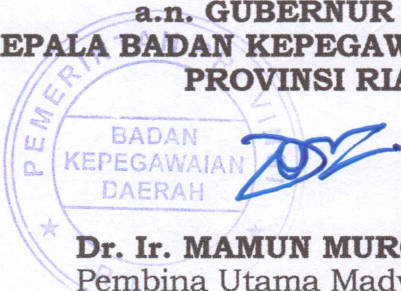
Lampiran II : Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts.000.7.2.4/BKD/1.1/II/2024/ 2436
Tanggal : 02 Februari 2024

AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

NO	AGENDA	JADWAL
1	2	3
RENCANA KERJA TAHUN 2025		
1	Persiapan Penyusunan Renja	Januari 2024
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja	
3	Penyusunan Rancangan Renja	
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Februari 2024
5	Penyempurnaan Rancangan Renja	Maret 2024
6	Perumusan Rancangan Akhir Renja	Mei 2024
7	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juni 2024
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024		
1	Persiapan Penyusunan Perubahan Renja	Juni 2024
2	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah	Juli 2024
3	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Agustus 2024

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 02 Februari 2024

a.n. GUBERNUR RIAU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU



Dr. Ir. MAMUN MUROD, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008

TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN KEPAGWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	V		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	Daerah	4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29			
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	V		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	V		
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD,	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31			
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32	V		
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	V		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	V		
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	V		
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN			

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	V		
5	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.	V		
6	LAMPIRAN	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2025) 2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025	V		

Pekanbaru, Juni 2024

**PERANGKAT DAERAH :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Sekretaris,

T. FAISYAL, SE

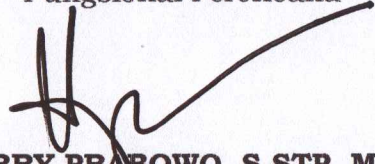
NIP. 19700525 199703 1 004

Mengetahui,
BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU
Kepala Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

RAJA JUARISMAN, ST., M.Si

NIP. 19770611 200012 1 002

Fungsional Perencana



HARRY PRABOWO, S.STP. M.E

NIP. 19860308 200412 1 001

Verifikator :

1. **Ir. RIA ETTIKA, M.Si**
NIP. 19690223 199210 2 001
2. **ARI DIANUARI**
NIP. 19810103 200902 1 002
3. **INDAH OKTAVIANI, ST**
NIP. 19861026 201001 2 012